

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian seta akan diuraikan bebrapa teori yang digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Manusia adalah makhluk sosial memiliki kemampuan yang terbatas, maka untuk mengendalikan dan memenuhi kebutuhanya manusia memerlukan bantuan manusia lainnya. Beragamnya kebutuhan manusia yang akn di penuhi juga berorientasi dengan semakin meningkatnya kualitas kerja yang di hasilkan oleh manusia.

Tata tertib dan keteraturan dan kerjasama, sangat penting dalam peradaban manisia untuk mempertahankan hidup. Untuk memenuhi itu semua dan terciptanya kesejahteraan manusia dalam dilakukan dengan cara menjalankan administrasi.

Administrasi dalam arti luas menurut Zulkifli (2009;8) adalah mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.administrasi merupakan rangkaian kegiatan penata pekerjaan yang

dilaksanakan bersama untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama.

Selanjutnya administrasi menurut menurut Lenard D.white (dalam Syafri 2012;9) mengatakan adminstrasi adalah proses yang selalu terdapat dalausaha kelompok, publik atau privat, sipil ataumiliter, skala besar atau kecil.

Selanjutnya menurut The Liang Gie (dalam zulkifli 2009;12) administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja samamencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut ordway tead (dalam Dewi 2011;6) mengatkan administrasi adalah kegiatan kegiatan yang harus di lakukan oleh pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan melengkapi usaha, kerjasam sekelompok orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun menurut Brook Adams (dalam Syafri 2012;8) mengatakan administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisasi sedemikian padunya kekuatan-kekuatan tersebut dapt bergerak sebagai satu-kesatuan.

Selanjutnya, Andrew Dunsire (dalam Syafri 2012; 6) menyebutkan beberapa arti istilah administrasi, antara lain.

1. Bantuan dan layanan, murni dan kesederhanaan (dengan tanpa praduga dan petunjuk);
2. Pemerintah atau penunjuk arah dalam pelaksanaan tujuan yang telah di tentukan atau tujuan akhir;eksekusi;
3. Petunjuk arah atau eksekusi terhadap kepentingan orang lain, pemerintah sebagai wakil atau yang di percaya;

4. Keterkaitan/hubungan antara raja dengan para pembantunya dalam pelaksanaan pemerintahan;
5. Kerja sama antara para menteri tanpa raja dalam pelaksanaan pemerintah sehari-hari;
6. Implementasi hukum dengan memanfaatkan mesin kantor sipil nonyudisial, pembentukan dan perawatan mesin tersebut, dan ketersediaan informasi yang di hasilkan untuk kepentingan legislatif;
7. Perlengkapan kantor sipil nonyudisial, kompleks departemen, pemerintahan yang dipimpin oleh sekretaris negara, menteri lain atau dewan pimpinan pegawai negeri sipil, administrasi publik;
8. Tugas kelompok pada tingkat administratif, memusatkan pada pekerjaan membuat kebijakan, dengan koordinasi dan pengembangan mesin pemerintahan dengan pengawasan administrasi umum departemen pelayanan umum;
9. Judul suatu subjek, bidang, disiplin, kursus atau ujian di sekolah, akademi, universitas atau institusi pelatihan lainnya;
10. Area akademik dan penelitian teoritis, deskripsi, dan evaluasi perlengkapan atau pekerjaan yang ada berhubungan dengan satu atau lebih dari makna sebelumnya.

Dari beberapa definisi administrasi secara umum dan menurut para ahli, dapat di simpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan (proses) usaha dan seni dalam bekerja sama yang dilakaukn oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Mifta Thoha (dalam Ibrahim: 2009), melihat reformasi administrasi public meliputi reformasi kepemimpinan, kelembagaan, dan reformasi system administrasi public itu sendiri terutama kasus di Indonesia.

Kemudian Batasan Administrasi Publik juga di rumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yaitu seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (negara indonesia) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala aparatur negara serta segenap dana dan daya demi terciptanya tujuan nasional dan terlaksananya tugas pemerintahan seperti yang di

tetapkan dalam Undang –Undang Dasar 1945.

Menurut Hadari (dalam Ibrahim:2009), menyatakan Administrasi Publik adalah upaya Administrasi yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan yang bersandar pada nilai-nilai untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bersifat Non-Profit. Administrai Publik harus mampu menyerap dan menyesuaikan aspirasi masyarakat. Untuk semua ini Administrasi Publik menuntu kepatuhan dan ketaatan semua pihak (sesuai aturan yang berlaku, demi otoritasnya).

Rumusan Administrasi Negara menurut Atmosudijdjo (dalam Ibrahim; 2009) menyatakan Administrasi negara adalah administrasi dari pada negara sebagai organisasi yang “mengejar” tercapainya tujuan –tujuan yang bersifat kenegaraan yang di tetapkan melalui Undang –Undang.

Administrasi Publik antara lain melingkupi; rumusan togas pokok, susunan organisasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi material/perlengkapan, hubungan kerja, tata kerja, administrasi perkantoran, administrasi perusahaan negara, dan segala bidang tingkat pemerintahan, keseluruhannya merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lain.(dalam Sugandha, 1995 ; 12)

Administrasi negara modern meliputi administrasi pemerintahan, administrasi ketatausahaan, administrasi pembangunan, administrasi kerumahtanggan negara dan administrasi lingkungan.(dalam Ibrahim, 2009; 16).

Selanjutnya administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014;3) adlah proses dimana sumber daya dan personel publik memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur - unsur (selain

perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut:

1. Organisasi publik, yang ada pada prinsip nya berkenaan dengan model - model organisasi, dan perilaku birokrasi
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktifitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan impleme
4. ntasinya, privatisasi, administrasi antar pmemrintah dan etika birokrasi

Jadi dapat di simpulkan batasan Administrasi Publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktifitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktifitas pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tujuan bernegara telah di ditetapkan sebelumnya.

2.Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi yang merupakan alat untuk merealisasikan konsep yang telah dipikirkan pada proses administrasi merupakan hal penting karena disinilah tempatnya orang bisa bekerjasama yang dapat di jadikan alat mengumpulkan orang- orang dengan tujuan yang sama.

Ada berbagai pendapat para ahli dalam mendefinisikan konsep organisasi diantaranya, menurut Terry (dalam Sufian, 2005;14) organisasi berasal dari kata “*organisme*” yaitu struktur dengan bagian yang demikian integritas hingga hubungan mereka satu sama lain deipengaruhi oleh hubungan. Dari pemahamana Terry dapat di maknai bahwa organisasi terdiri dari dua (2) pokok yaitu bagian - bagian dan hubungan-hubungan.

Kemudian menurut Massie (dalam Zulkifli 2009;14) organisasi merupakan kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas - tugasnya di antara para

anggota, menetapkan hubungan - hubungan kerja yang menyatukan aktifitas-aktifitasnya kearah mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya definisi organisasi menurut Thoha (2010 : 169) organisasi adalah kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektivitas tersebut, terbatas dan beridentifikasi yang dapat dibedakan dengan kolektivitas lainnya.

Organisasi sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, dan di pimpin, dalam memanfaatkan sumber daya organisasi (manusia, uang, mesin, metode, material, sarana dan prasarana, dan pasar/lingkungan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kerjasama yang terarah tersebut dilakukan dengan mengikuti pola interaksi antar individu atau kelompok. Pola interaksi tersebut di selaraskan dengan aturan, norma, keyakinan, nilai-nilai tertentu ditetapkan oleh para pendiri organisasi itu.

Menurut Namawi (2008;13) menyatakan bahwa dalam sebuah organisasi memiliki unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah;
2. Filsafat, yaitu manusia yang menghimpun diri didalam organisasi dengan hakekat kemanusiannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama;
3. Proses, yaitu kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan;
4. Tujuan, yaitu organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi

kebutuhannya.

Di lihat dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu tempat atau wadah dalam melakukan kerjasama yang didalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, pembagian tugaspekerjaan, tanggung jawab, penetapan tugas, serta wewenang sehingga pihak bersangkutan dapat melaksanakan pekerjaan yang telah di tentukan dalam mencapai tujuan bersama.

Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum (*of people*). Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Organisasi publik sering di lihat pada bentuk organisasi pemerintahan yang di kenal dengan Birokrasi Pemerintahan.

Organisasi Publik adalah organisasi pemerintah yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan memepunyai kewenangan yag absah (legitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negara, dan melayani keperluannya.

Selanjutnya organisasi publik mempunyai tiga arti (dalam Anggara, 2017;244-245) yaitu;

1. Sekelompok orang yang harus bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan publik/negara.
2. Struktur-struktur adalah suatu tantangan hubungan hirarki antara orang-orang yang masing-masing memegang/menjalankan jabatan/tugas/fingsi. Struktur mengendalikan mekanisme yang menggerakkan kegiatan-kegiatan dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berorientasi pada pelayanan masyarakat dan tujuan –tujuan tertentu.

Menurut Osborn dan Gabler (1997) karakteristik organisasi publik adalah

sebagai berikut;

1. kebijakan –kebiajajn pengelolaan atau kepemimpinan organisasi publik pada dasarnya dimotivasi kepuasan dalam pelayanan.
2. Organisasi publik memperoleh pembiayaan dari pembayaran pajak.
3. Organisasi publuk bersifat demokratis dan terbuka, biasanya lebih lamban dalam mengambil keputusan.
4. Misi organissi publik adalah melakukan perbaikan.

Dari beberapa penjelas teori mengenai Organisasi Publik dapat disimpulkan bahwa oraganisasi publik adalah suatu organisasi yang diadalam negara kemudian disebut organisasi pemerintahan yang di kenal birokrasi untuk melaksanakan pelayan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah di tetapkan sebelumnya.

3.Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistemasisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan organisasi sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural Resources*) secara efektif dan efisisen untuk mencapai tujuan (Siswanto 205;9).

Menurut Siagian (2003;5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan - kegiatan orang lain.

Pada fungsi perencanaan tercakup fungsi pengembalian keputusan

(*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*) dalam fungsi pengorganisasian terdapat fungsi staff (*staffing*), fungsi pelatihan (*Training*), dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*), sementara fungsi penggerakan meliputi fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi memimpin (*leading*).

Selanjutnya menurut Stoner (dalam Zulkifli 2009;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, sumber daya dari suatu organisasi (material, manusia, informasi, dll) untuk mencapai sasaran.

Adapun menurut Dewi (2011;10) berpendapat bahwa manajemen adalah kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang, serta mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik.

Jadi dari beberapa definisi manajemen di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang di gunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar dapat menggerakkan sumber daya organisasi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Pembangunan Birokrasi juga dapat dipelajari dan paradigma *New Publik Manajemen* yang muncul di Inggris, New Zealand, Amerika Serikat dan Kanada. Istilah Manajemen pada *New Publik Manajemen* diberikan lantaran istilah ini lebih agresif dari pada istilah *Administration*.

Menurut Overman (dalam Ibrahim, 2009:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen dengan SDM, Keuangan, fisik, informasi, kebijaksanaan politik.

Sedangkan menurut OTT, Hyde dan Shafriz (2009) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah bidang administrasi publik yang mempersentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai dengan perintah kebijakan publik.

Kemudian manajemen publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kegiatan –kegiatan organisasi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara.

Perkembangan manajemen publik dimasa yang akan datang, perlu memperhatikan beberapa hal (dalam Ibrahim, 2009:84) antara lain;

1. perlu mengidentifikasi secara jelas peran dan pelayanan publik dalam proses demokrasi, sekaligus standar dan mutu kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci;
2. perlu fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan mempekerjakan dan memecat pegawai yang harus di berikan kepada para petinggi dan pimpinan instansi;
3. pengangkatan dan pengajuan pejabat oleh presiden harus di kurangi, dan lebih diberikan ruang pengembangan karier profesional;
4. pemerintah harus melakukan investasi lebih besar dibandingkan pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen.

Jadi dari beberapa batasan pendefenisian manajemen publik adalah suatu studibagian dari ilmu administarasi publik yang mempersentasikan pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, SDM, saran dan prasarana publik untuk digunakan dalam kegiatan –kegiatan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan- tujuan

publik.

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Pardede (2007;38) kebijakan adalah suatu pernyataan umum yang menunjukkan aturan dan ketentuan yang membetasi putusan-putusan yang akan diambil oleh para pembuat putusan dalam suatu organisasi.

Selanjutnya menurut Laswell dan Kaplan (dalam Lubis 2007;9) kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai dan praktek.

Dalam definisi lain yang diungkapkan Budiardjo (2008;20) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Adapun menurut James Anderson (dalam Agustino 2012 ; 6) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Publik Policy Making*, adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik (Agustino. 2012 ; 8-9).

1. Pada umumnya kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak;
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah;

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur di semua bidang;
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif;
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk keputusan yang sengaja dan sadar dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang-orang yang berisi aturan-aturan dalam upaya mengatasi masalah yang diarahkan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adam Ibrahim dan Juni Pranoto (2011;60) dalam bukunya “Revitalisasi Administrasi Pembangunan” pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat,2010).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan/berkelanjutan. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan umumnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain.

Langkah itu pada dasarnya nermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus-menerus. Upaya pemberdayaan tidak terlepas dari langkah partisipasi, tanpa partisipasi upaya yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat (Manuwoto. 1998;15).

Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikmat, 2001;11). mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

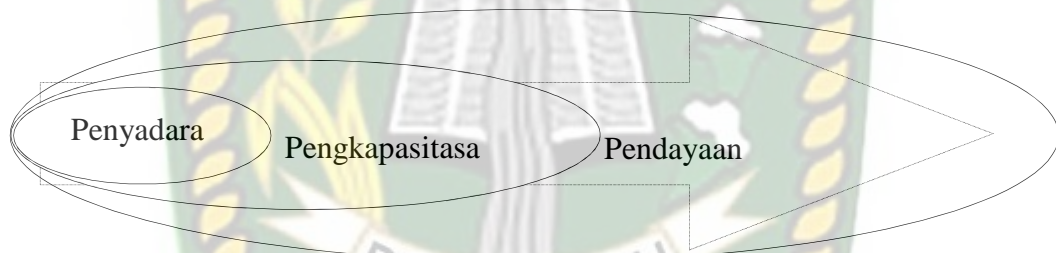
Menurut Noe Etal (dalam A.Usmara, 2002;123) pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Pemberdayaan sebagai konsep social budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah social budaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya.

Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Untuk lebih lanjut dapat di jelaskan dengan gambar sebagai berikut;

Gambar II. 1 : **Gambar Tahapan Pemberdayaan**



Sumber : Randi dan Riant nugroho (2007).

- a) Tahapan Penyadaran; Pada tahapan ini masyarakat yang ingin di berdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak sesuatu.
- b) Tahapan Pengkapasitasan; Tahap ini disebut juga “*capacity building*” atau memampukan. Untuk diberi daya atau kuasa yanbersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis yaitu, manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sitem nilai terkait dengan “aturan main” yang akan di gunakan dalam pengelolaan peluang.
- c) Tahapan Pendayaan (dalam makna sempit); Pada tahapan ini, kepada pelaku UMKM diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang di sesuaikan dengan kemampuan yang di miliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditemouh dengan memberikan

peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,

Sementara itu, Wilson (dalam Totok dan Poerwoko, 2015) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari;

Gambar II. 2; Siklus Pemberdayaan Masyarakat



Sumber ; Totok Mardianto dan Poerwoko Soebianto (2015).

- a) Menumbuhkan keinginan seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
- b) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk dikemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
- c) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian

- dalam kegiatan pemberdayaan yang membikan manfaat atau perbaikan keadaan;
- d) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah di rasakan manfaat/perbaikannya;
 - e) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
 - f) Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
 - g) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Selanjutnya menurut Kartasasmita (2000;195) Pemberdayaan memiliki tahapan-tahapan upaya pemberdayaan, dengan indikator :

- a. Pemungkinan (*enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan (*empowering*), yakni dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya secara mandiri.
- c. Perlindungan (*protecting*), harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Mengacu kepada konsep-konsep di atas, maka tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai macam upaya perbaikan sebagai berikut (T. Mardikanto dan Poerwoko S, 2015).

- a) Perbaikan pendidikan (*better Education*), dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang di lakuakn melalui pemberdayaan tidak terbatas pada; perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu , serta hubungan fasilitator dan pemnerima manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkn semangat belajar seumur hidup;
- b) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar , diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran;
- c) Perbaikan tindakan (*better actoin*), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya

- yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- d) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan tindakan/ kegiatan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring mita usaha;
 - e) Perbaikan usaha (*better bussiness*), dengan terjadinya perbaikan kelembagaan memperbaiki bisnis yang di lakukan;
 - f) Perbaikan pendapatan (*better income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang di perolehnya, termasuk pendaptan keluarga dan masyarakat;
 - g) Perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan di harapkan dapat memperbaiki lingkungan (budaya dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas;
 - h) Perbaikan kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membeik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap kelurga dan masyarakat;
 - i) Perbaikan masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang di dukung oleh lingkungan, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

Selanjutnya menurut Suhendra (2006;86) tujuan pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratis, kesetaraan masyarkat denga pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berekreatifitas, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola asset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, hak untuk menikmati jerih payah sebagai sebuah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang alan dituku oleh gerakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun berkaitan dengan kolektivitas, dlam arti mengaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

6. Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang - Undang memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Badan pusat Statistik (BPS)

memeberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja maksimal 5 orang termasuk keluarga, Usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang, sedangkan Usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada dasarnya mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang - Undang tersebut yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan uaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang - Undang ini.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian lansung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang ini.

Selanjutnya Pengertian Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan dari total kekayaan usaha (*asset*) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (*netto*) yang berasal dari penjualan dalam satu tahun baku.

Kemudian Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria Usaha Mikro jika usaha memiliki pekerja atau karyawan maksimal 5 (lima) orang termasuk keluarga. Sedangkan Usaha Kecil jika Unit usaha memiliki pekerja atau karyawan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang. Dan Usaha Menengah jika Unit Usaha memiliki Pekerja atau karyawan 10 (sepuluh) samapai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

Selanjutnya menurut Bank Indonesia (BI) kriteria Usaha Mikro jika unit usaha memiliki Aset paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Omset paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah. Sedangkan Usaha Kecil jika unit usaha memiliko Aset paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Omset paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan Usaha Menengah memiliki Aset paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan omset paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan UKM diatur oleh beberapa peraturan berikut; surat edaran Bank Indonesia NO. 26/1/UKK tahun 1993 perihal kredit usaha kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah yang ditempati.

Selanjutnya menurut inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria; a) Asset Rp 50 Milyar, tidak termasuk tempat usaha, (b) omset Rp 250 Milyar.

Sehinga dapat disimpulkan bahwa antara UKM dan UMKM sama saja yang berbeda dalam jumlah nominal omset yang dimiliki oleh suatu usaha dan bisnis.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan persatuan pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi oleh azaz kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

7. Konsep Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan kemampuan melihat dan menilai kesempatan - kesempatan (peluang) bisnis serta peluang mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam upaya mensukseskan usahanya.

Menurut Peter Ducker (Alma 2003;19) seorang wirausaha adalah seorang yang mampu memanfaatkan peluang usaha. Pengertian wirausaha lebih lengkap dinyatakan oleh Schmpeter adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru (dalam Alma 2011;24)

Selanjutnya menurut Edi Swanso (dalam Suryana 2013;14) mengatakan wirausahawan adalah penguasa tetapi tidak semua pengusaha itu wirausahawan. Wirausahawan adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi dan misi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi dalam bidang usaha.

Pandangan ahli manajemen mengatakan wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya, seperti keuangan (*money*), bahan mentah (*material*), tenaga kerja (*labour*), keterampilan (*skill*), dan informasi (*informatoin*), untuk menghasilkan produk baru, proses produksi baru, bisnis kerja, dan organisasi usaha baru. Marzuki Usman (Suryana 2013;13)

Selanjutnya menurut Adi Sutanto (dalam Siswadi 2013;7) beberapa faktor- faktor dalam mempengaruhi untuk menjadi wirausahawan yaitu adanya keinginan merasakan pekerjaan bebas, keberhasilan diri yang dicapai, dan toleransi akan adanya resiko. Seseorang wirausahawan memiliki kebebasan dalam dirinya untuk melakukan seluruh aktifitas usaha yang di jalannya.

Kewirausahaan adalah nilai yang di wujudkan kealam prilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. Sedangkan Prawiro mengatakan kewirausahaan adalah nilai yang di perlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Kemudian adapun ciri -ciri dalam sikap mental para wirausahawan menurut Mun'im (dalam Siswandi 2013;4) sebagai berikut;

1. Memiliki kepribadian yang unggul, yaitu berdaya pikir positif, mampu merumuskan tentang apa yang dicita-citakan dapat menempatkan waktu, kesempatan serta melakukannya
2. Mengenal diri sendiri, yang berarti dapat memilih dan menentukan kegiatan yang sesuai dan serasi dengan kemampuan diri sendiri.
3. Memiliki keahlian khusus ataupun keterampilan tertentu
4. Kemauan dan kesediaan untuk belajar terus dan bekerja keras
5. Memiliki kekayaan berupa kekayaan mental, spiritual serta kekayaan intelektual dan material
6. Mengetahui dan memperhatikan hambatan - hambatan yang ada dan kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi.

kewirausahaan terletak pada kreatifitas dan inovasi. Kreatifitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara - cara baru dalam memecahkan masalah dan menentukan peluang, Sementara itu, inovasi adalah kemampuan menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Pemberdayaan” kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan hubungan di antara unsur diatas tidak terjadi kesalahan dalam pemafsiran makna.

Dari beberapa fenomena yang terjadi terkait Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru masih kurang terpenuhi faktor-faktor penentu dalam pemberdayaan, juga melihat upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dalam merumuskan kebijakan untuk strategi pengembang UMKM.

Jika seluruh indikator ini dilaksanakan dengan optimal maka upaya pengembangan UMKM yang di lakukan oleh Dinas Koperas UMKM telah

berhasil dengan baik. Dan sebaliknya apabila indikator belum dilaksanakan dengan optimal maka upaya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM belum baik.

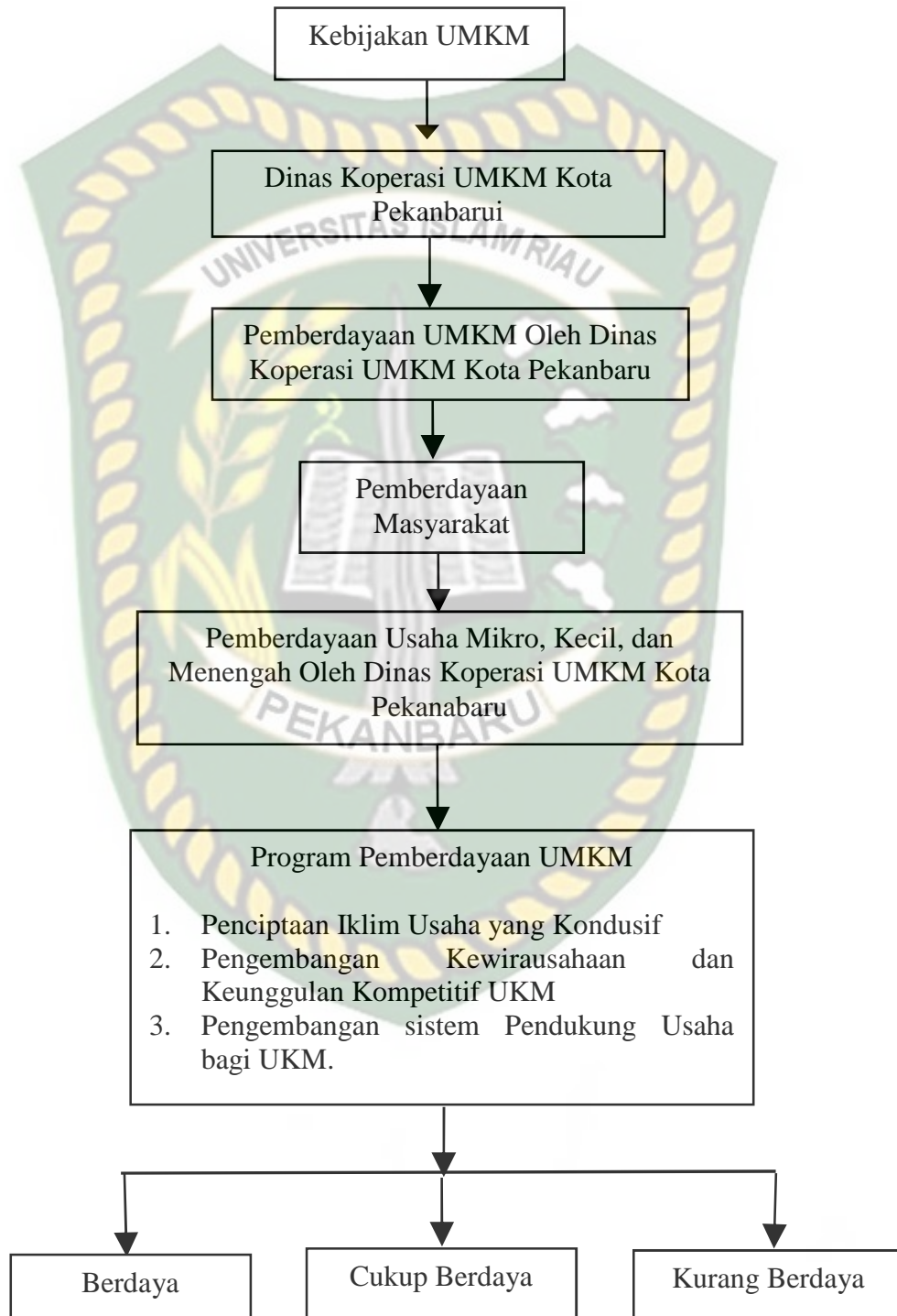
Kerangka pikir bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikatornya. Dan untuk menjelaskan tentang keterkaitan antara variabel dengan indikator Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru, yang digambarkan Sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar II.3 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Fungsi Pemberdayaan Usaha UMKM Oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru.



Sumber; Modifikasi Penulis, 2017

C. Hipotesis

Menurut Sugiono (2003;70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan judul penelitian dan fenomena masalah tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam usulan penelitian ini adalah “Diduga Fungsi Pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Pekanbaru terhadap pelaku Usaha UKM di Kota Pekanbaru masih banyak kekurangan dan belum terlaksana”

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan untuk memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam penelitian, maka penulis perlu menjelaskan konsep operasional, yaitu sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Administrasi Publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasiakn dan mengelola keputusan - keputusan dalam Kebijakan Publik yang efektif dan efisisen dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
3. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang membagi

tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama.

4. Organisasi Publik adalah organisasi besar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan bangsa mempunyai kewenangan yang absah (*legitimasi*) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya.
5. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
6. Manajemen Publik adalah suatu sistem kinerja yang komplet dan aktornya yaitu pemerintah dan pegawai - pegawainya guna melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat
8. Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dlam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Kewirausahaan adalah kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumberdayadan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam upaya mensukseskan usahanya.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pengembangan Usaha adalah Upaya yang di lakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian Fasilitas, bimbingan , pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
12. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.
13. Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan maupun pelaku usaha barang dan jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.
14. Meningkatkan Sumber daya Manusia adalah kegiatan untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam sebuah kegiatan.

15. Desain dan Teknologi adalah bagaimana proses produksi, kemasan, pemasaran dilakukan dengan cara se efisien mungkin dengan menggunakan mesin mesin canggih.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang di upayakan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
17. Modal usaha adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.
18. Sarana dan prasana adalah sesuatu yang di gunakan dalam menunjang kegiatan yang di lakukan secara efektif dan efisien.
19. Informasi Usaha adalah kesempatan yang sama dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
20. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar disertai pembinaan dengan prinsip saling menguntungkan dan menguatkan.
21. Perizinan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh

seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

22. Promosi adalah suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar menarik calon konsumen untuk membeli produk nya.
23. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Pembinaan dan Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab dalam melayani dan melindungi Usaha Masyarakat.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep - konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokkan item penelitian yang mana sebagai variabel pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Penelitian tentang Pemberdayaan Usaha UMKM Oleh Dinas Koperasi UMKM Kota pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pemberdayaan adalah Uoaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergi dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM).	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.Pembinaan dan Pengembangan Usaha 2.Pertumbuhan Iklim Usaha	a) Produksi dan Pengolahan; b) Pemasaran produk; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia; d) Desain dan Teknologi. a) Modal Usaha; b) Sarana dan Prasarana; c) Informasi Usaha; d) Kemitraan; e) Perizinan; f) Promosi Usaha;	Berdaya Cukup berdaya Kurang Berdaya Berdaya Cukup Berdaya Kurang Berdaya

Sumber : Modifikasi Penulis, 2016 (Dari Berbagai Referensi)

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini di klasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori : Berdaya, Cukup Berdaya,

dan Kurang Berdaya. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut dapat dilihat berikut ini;

Ukuran Variabel

Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar

berada pada skala 67 - 100%

Cukup berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada

pada skala 34 - 66%

Kurang Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada

skala 1-33%

Indikator Ukuran Variabel

Adapun ukuran indikator variabel adalah sebagai berikut;

1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan kegiatan berada pada

skala 67-100%

Cukup Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan kegiatan berada pada skala 34-

66%

Kurang Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan

kegiatan

berada pada skala 1-

33%

2. Pertumbuhan Iklm Usaha

Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan

kegiatan berada pada skala 67-100%

Cukup Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan

kegiatan berada pada skala 34-66%

Kurang Berdaya : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan kegiatan

berada pada skala 1-33%

